

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak yuridis dari kewenangan sentralisasi oleh pemerintah pusat dalam mengatasi konflik lingkungan yang terjadi di Kabupaten Toba adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba mengalami kebuntuan dalam bertindak dan tidak dapat melakukan intervensi secara langsung kepada para pihak yang berkonflik, lambatnya proses penyelesaian konflik akibat harus menunggu pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk turun ke daerah dalam melakukan penegakan hukum, pencemaran lingkungan yang berkepanjangan akibat proses penyelesaian yang lambat, dan konflik yang berkepanjangan antara pihak masyarakat Kabupaten Toba dengan Pihak PT Toba Pulp Lestari.
2. Alasan mengapa kewenangan penegakan hukum untuk mengatasi konflik lingkungan di daerah Kabupaten Toba menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah karena Pemerintah Pusat ingin melakukan percepatan investasi di daerah, serta akibat dari faktor penegak hukum (aparatur) yaitu PPNS yang belum tersedia di daerah, dan sarana dan fasilitas yang tidak terdapat di daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka saran dari penulis sebagai berikut:

1. Perlunya pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang terkait kewenangan sentralisasi dalam hal penyelesaian konflik lingkungan yang terjadi di daerah, agar daerah juga diberikan kesempatan untuk dapat melakukan proses penegakan hukum secara mandiri apabila terjadi konflik di daerah, dan dalam melakukan proses penyelesaian konflik lingkungan yang terjadi di Kabupaten Toba, Pemerintah Pusat sebaiknya melibatkan para tokoh - tokoh adat untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut.
2. Perlunya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah dengan cara melakukan pelatihan dan juga pembentukan PPNS di daerah serta melengkapi sarana dan fasilitas yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Toba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alamsah, N. (2017). Teori & Praktek Kewenangan Pemerintah. Bandung: Unpad Press.
- Amiruddin. (2024). Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Amriani, M. (2012). Mediasi Alternatif Penyelesaian Konflik Perdata Di Pengadilan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Atmosudirjo, Prajudi. (1981). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiarjo, Miriam. (2008). Dasar - Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chatim, Nhurmi. (2006). Hukum Tata Negara. Pekanbaru: Cendikia Insani.
- Fahmal, M. (2006). Peran Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Yogyakarta: UII Press.
- Ganjong. (2007). Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum. Jakarta: Galia Indonesia.
- Gultom, Ibrahim. 2010. Agama Malim di Tanah Batak. Jakarta: Bumi Aksara.
- H.R, Ridwan. (2018). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philippus M. (2005). Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hakim, L. (2012). Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah. Malang: Setara Press.
- Hardjasoemantri, K. 2012. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidjaz, Kamal. (2010). Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Huda, N. (2014). Ilmu Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ilmar, A. (2013). Hukum Tata Negara. Makassar: Universitas Hasanuddin.

- Kansil, C. S. T. (2008). Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kencana, I. (2019). Ilmu Negara Kajian Ilmiah dan Keagamaan. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Koentjaraningrat. (1982). Kebudayaan Mentaliteit dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.
- Manan, Bagir. (2000). Wewenang Provinsi Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Fakultas Hukum Unpad.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty.
- Mulyawan, R. (2015). Sistem Pemerintahan Indonesia. Bandung: Unpad Press.
- Rahardjo, S. (2008). Bandung: Ilmu Hukum. Citra Aditya.
- (2009). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmadi, T. (2010). Mediasi Penyelesaian Konflik Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rajamarpodang. 1992. Dalihan Natolu Nilai Budaya Suku Batak. Medan: CV Amanda.
- Rochmani. (2022). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Beserta Keadilan Antar Generasi. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Safitiri, D. (2020). Ekolabel dan Pendidikan Lingkungan Hidup. Tangerang: PT Pustaka Mandiri.
- Salim HS & Erlies Septiana. (2016). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso, R. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, B. (2005). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yusnadi. (2022). Epistemologi Kausasi Teleologis Hukum Islam. Yogyakarta: Diandra Creative.

Jurnal

- Abdul Rauf Alauddin Said. 2015. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - Luasnya Menurut UUD 1945. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 4 Halaman 583-585.
- Aritonang, Agnes Grace. 2016. Pengelolaan Limbah di Perusahaan Pulp PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara Menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 3 Halaman 117.
- Ateng Syarifuddin. 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab. *Jurnal Pro Justitia*, Volume 4 Nomor 1 Halaman 22.
- Evi Purnama Wati. 2018. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan yang berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 3 Nomor 1 Halaman 122.
- Fauzan Faza. 2023. Teori Hukum dan Keadilan Menurut Karl Max. *Jurnal Filsafat Terapan*, Volume 1 Nomor 1 Halaman 6.
- Muliadi Anangkota. 2017. Klasifikasi Sistem Pemerintahan (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3 Nomor 2 Halaman 149.
- Mario Julyano. 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, Volume 1 Nomor 1 Halaman 14.
- Rumapea, Murni Eva. 2015. Dampak Modernisasi Terhadap Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Kota Medan. *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, Volume 1 Nomor 2 Halaman 168.
- Nurul Qamar. 2014. Wewenang Dalam Konsep Hukum dan Kekuasaan. *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Halaman 23.
- Rira Nuradhwati. 2019. Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, Volume 2 Nomor 1 Halaman 154-155.
- Sudiarto. 2023. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *Jurnal Kompilasi Hukum*, Volume 8 Nomor 1 Halaman 70-72.

Suwarso. 2018. Dampak Kuliah Sambil Bekerja Terhadap Indeks Prestasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Di Kabupaten Jember Tahun 2017. Jurnal Relasi, Volume 14 Nomor 2 Halaman 17.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang - Undang Dasar Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138).

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32).

Website

<https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/jabatan-fungsional?id=02757ce7a8d7a74f61f2174aef61ca4b>, diakses 17 September 2025.

<https://indonesiabaik.id/infografis/prosedur-dalam-penyusunan-uu-cipta-kerja>, Diakses 17 September 2025.

<https://kbbi.web.id/dampak> , diakses 18 September 2025.

<https://kamushukum.web.id/?s=yuridis>, diakses 18 September 2025.

<http://kbbi.web.id/perintah>, diakses 19 September 2025.

<https://www.kompas.id/artikel/jutaan-warga-serukan-tutup-pt-toba-pulp-lestari-di-hari-lingkungan-hidup-sedunia>, Diakses 26 September 2025.

<https://kaoemtelapak.org/id/ramai-ramai-menyerukan-tutup-pt-toba-pulp-lestari-tutuptpl/>, Diakses 26 September 2025.

<https://aman.or.id/news/read/2147>, Diakses 26 September 2025.

<https://news.detik.com/berita/d-5598047/diduga-cemari-lingkungan-34-tahun-pabrik-di-toba-diadukan-ke-bareskrim>, Diakses 26 September 2025.

Agus Riyanto, 2023, Penegakan hukum, Masalahnya Apa?, Binus University, Business Law, Diakses 26 September 2025.

<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukummasalahnya-apa/>
<https://sinar.big.go.id/detail/berita/Kabupaten-Toba-Samosir-berubah-nama-jadi-KabupatenToba#:~:text=Akhir%20bulan%20Februari%202020%20lalu,berubah%20nama%20menjadi%20Kabupaten%20Toba>, Diakses 16 Oktober 2025.

<https://www.tobapulp.com/tentang-kami/#anggaran>, Diakses 16 Oktober 2025.

<https://www.tobapulp.com/wp-content/uploads/2024/07/Forest-management-plans.pdf>, Diakses 16 Oktober 2025.

<https://dislindup.tobakab.go.id/struktur-organisasi/>, Diakses 17 Oktober 2025.

<https://mongabay.co.id/2021/04/07/konflik-lahan-dan-kerusakan-lingkungan-terus-terjadi-dalam-operasi-tpl/>, Diakses 17 Oktober 2025.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=indorayon&tp=0&cat=20b9031c89f699d59202fe933a3a58af>, Diakses 29 Oktober 2025.